

Studi Penanggulangan Bencana Secara Kolaboratif Yang Berbasis Komunitas Di Kota Kendari

Oleh: Tanzil

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari.

Email: tanzil@uho.ac.id

Abstract

This study aims to analyze community-based collaborative disaster management in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Research data was collected through several sources, both primary and secondary. Data analysis was carried out with a qualitative approach. The results of the study show that the government has taken collaborative steps to encourage and implement community-based disaster management. The company takes advantage of the company's responsibility to alleviate the suffering of people affected by disasters. Although there are still many challenges to be faced, efforts to encourage the involvement of various parties in disaster management can provide new hope to create a region that has vigilance in dealing with disasters. Therefore, this study shows that there are efforts by the government and the community in implementing a community-based collaborative approach and there has been positive progress in disaster management, but on the other hand, a wider space is still needed to improve community preparedness in dealing with disasters.

Key Words: *Disaster Management, Collaborative, Community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan bencana secara kolaboratif yang berbasis komunitas di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa sumber, baik primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah kolaboratif untuk mendorong dan mengimplementasikan penanggulangan bencana berbasis komunitas. Perusahaan memanfaatkan tanggung jawab perusahaan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi namun upaya mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dapat memberikan harapan baru untuk menciptakan wilayah yang memiliki kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan pendekatan kolaboratif yang berbasis komunitas dan telah ada progress yang positif dalam penanggulangan bencana, namun disisi lain masih diperlukan ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Kollaboratif, Komunitas

PENDAHULUAN

Seperti tertulis dalam laporan Risiko Global (Sulaiman et al., 2019), pada saat ini dunia menghadapi berbagai persoalan perubahan iklim, adanya ketidakstabilan sosial, terjadinya inflasi yang sulit dikendalikan, munculnya migrasi massal yang tidak dapat dikendalikan, adanya kerugian

keanekaragaman hayati, terorisme, dan lain sebagainya. Telah diprediksi bahwa di negara-negara di Asia kemungkinan besar akan mengalami bencana alam yang begitu besar dengan peristiwa cuaca ekstrem (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2019). Asia telah menyumbang sekitar 70% dari bencana alam di dunia (ADB, 2012). Faktor utama hal ini terjadi adalah disebabkan Asia Pasifik terletak di Lingkaran Api Pasifik, dan ini menyebabkan 90% gempa bumi di dunia dan lebih kurang 70% gunung berapi di dunia (“Build. Urban Resil.,” 2013).

Kawasan Asia telah berkontribusi pada peningkatan jumlah kota di dunia dan menampung setengah dari populasi kota di dunia. Peningkatan populasi perkotaan tersebut telah menciptakan berbagai jenis ancaman bencana (Sulaiman et al., 2019). Kota-kota di negara-negara berkembang, memiliki resiko terhadap ancaman iklim sebagai akibat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, saluran drainase diberbagai kota yang tidak terawat, sampah-sampah diperkotaan, pembangunan infrastruktur yang berisiko yang mengganggu saluran, dan perkembangan lahan pemukiman yang tidak terkendali (“Build. Urban Resil.,” 2013). Perubahan iklim dengan perubahan lingkungan dan infrastruktur perkotaan semakin mengancam kehidupan manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, penting bagi sebuah pemukiman untuk menjadi kawasan yang memiliki kewaspadaan menghadapi bencana karena risiko ketidakmampuan menjadi menghadapi bencana akan menyebabkan penurunan dalam aspek ekonomi, sumber daya, ekosistem, dan akhirnya akan mengganggu kehidupan masyarakat.

Pemanasan global (*global warming*) saat ini, menjadi istilah yang sangat populer ditelinga masyarakat. Ja’far dan Kartikasari (2009) mengungkapkan bahwa aktivitas sosial ekonomi menjadi salah satu pendorong munculnya pemanasan global. Tumbuhnya aktivitas industri telah berkorelasi secara positif dengan peningkatan emisi dari berbagai kegiatan operasi perusahaan. Sejumlah perusahaan menyatakan produk-produk yang telah dihasilkannya merupakan produk yang ramah lingkungan, tetapi entitas industri belum dapat memberikan penjelasan yang cukup tentang upaya mereka untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi (Achmad Zainal Arifin, 2019; S & Kartikasari, n.d.; Tamitiadini et al., 2019).

Indonesia merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang rawan bencana. Minimal sebanyak 14 jenis ancaman bencana yang dapat dikelompokkan kedalam bencana geologi (gerakan tanah/ tanah longsor, gunung berapi, gempa bumi, likuefaksi, tsunami), bencana hidrometeorologi (kebakaran hutan dan lahan, banjir, gelombang ekstrim, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan), serta bencana antropogenik (covid-19, epidemi/ wabah penyakit, kegagalan teknologi/ kecelakaan industri), migran karena kerusuhan sosial seperti terjadi pada tahun 1999 (BNPB, 2021; Tanzil, 2023).

Untuk menghadapi ancaman bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengupayakan tata kelola pengurangan risiko bencana dan penguatan kelembagaan melalui pendekatan kolaborasi yang berbasis komunitas.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Masih adanya ketidaksamaan pandangan mengenai paradigma penanggulangan bencana yang dilakukan akhir-akhir ini. Koordinasi antar instansi terkait belum beradaptasi dengan peran lembaga-lembaga yang berperan sebagai koordinator penanggulangan bencana terkait dengan kebencanaan serta sosialisasi dan pembinaan penting untuk secara menyeluruh (Ramadani, 2015).

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, keterlibatan komunitas seringkali diawali melalui kerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah (non government organization/NGO) dan akademisi (peneliti). Akademisi dan NGO didorong untuk mempromosikan pengembangan konsep pendekatan masyarakat/komunitas untuk pengelolaan tanggap darurat bencana dan upaya pemulihan agar mereka dapat terus mendukung masyarakat untuk memperkuat ketahanan mereka setelah bencana (Pasaribu et al., 2023; Tanzil, 2024). Kolaborasi dengan komunitas/masyarakat memenuhi tujuan tata pemerintahan yang baik .

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan bencana secara kolaboratif yang berbasis komunitas. Kajian ini sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi akhir-akhir ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Tanzil, 2019). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami fenomena yang kompleks dan konteks spesifik yang terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa sumber. Sumber pertama adalah dokumen-dokumen terkait kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait mengenai penanggulangan bencana. Sumber kedua adalah wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah, ahli bencana, akademisi, dan perwakilan masyarakat setempat. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada ketersediaan informan. Selain itu, pengamatan langsung juga dilakukan untuk mengamati kondisi fisik dan infrastruktur kota yang relevan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Kajian ini membahas penanggulangan bencana secara kolaboratif yang berbasis komunitas (Tanzil et al., 2019). Konsep ini telah muncul sebagai pendekatan penting dalam menghadapi

ancaman bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan peningkatan kerentanan terhadap bencana telah mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan di Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada peningkatan keterlibatan komunitas.

Perkembangan pendekatan peningkatan keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor utama adalah pengalaman negara ini dalam menghadapi bencana alam yang signifikan, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana-bencana ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan penghancuran infrastruktur, memicu kebutuhan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana. Selain itu, juga dipengaruhi oleh pertumbuhan yang pesat kawasan perkotaan dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong dan mengimplementasikan penanggulangan bencana berbasis komunitas. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB). Implementasi di Kota Kendari, badan ini telah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional dan mempromosikan pendekatan yang holistik dan terpadu terhadap manajemen risiko bencana. Sejalan dengan pandangan Warsono (Warsono & Buchari, 2019) kebijakan ini dilakukan untuk mendorong penanggulangan bencana baik secara struktural maupun secara kultural. Secara struktural dilakukan melalui pembangunan prasarana fisik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Secara kultural dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat sehingga terbangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Selain itu, pemerintah di kota Kendari juga telah menerapkan kebijakan sistem ketahanan berbasis kewilayahan. Dengan kebijakan ini telah terdorong keterlibatan masyarakat di daerah dari level bawah untuk penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan pandangan (Rahman et al., 2022). bahwa masyarakat tidak hanya menjadi obyek namun juga subjek dalam penanggulangan bencana. Baik itu pada bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Dalam perkembangan terakhir ini, bencana yang terjadi di negara kita dapat pula dispesifikasikan berdasarkan karakter wilayah. Pemahaman seperti ini, bisa menjadi salah satu metode dalam pencegahan kebencanaan di setiap wilayah.

Selain langkah-langkah pemerintah tersebut dalam penanggulangan bencana, pemerintah berupaya mendorong peranan penting sektor swasta dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil telah terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, dengan membangun kapasitas lokal. Beberapa perusahaan dan lembaga swasta juga memiliki peran penting dalam penanganan bencana.

Perusahaan memanfaatkan tanggung jawab perusahaan *corporate social responsibility* untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.

Aspek pendanaan juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mengimplementasikan penanggulangan bencana secara efektif. Diperlukan sumber daya yang memadai untuk mendorong pembangunan infrastruktur tahan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini secara berkelanjutan, dan menjalankan program pemulihan pascabencana. Sangat penting pula mengalokasikan anggaran yang memadai serta berupaya mendapatkan sumber-sumber pendanaan berkelanjutan dalam mendukung terciptanya wilayah yang memiliki ketahanan dalam bencana.

Untuk itu, diperlukan penguatan pendekatan penanggulangan bencana berbasis komunitas melalui langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, partisipasi sektor swasta, dan peran aktif masyarakat sipil. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi namun upaya mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dapat memberikan harapan baru untuk menciptakan wilayah yang lebih aman dan cukup tangguh dalam menghadapi bencana.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah kolaboratif untuk mendorong dan mengimplementasikan penanggulangan bencana berbasis komunitas. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, pemerintah di kota Kendari juga telah menerapkan kebijakan sistem ketahanan berbasis kewilayahan. Dengan kebijakan ini telah terdorong keterlibatan masyarakat di daerah dari level bawah dalam penanggulangan bencana. Selain langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan bencana, masyarakat sipil telah terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, dengan membangun kapasitas lokal. Beberapa perusahaan dan lembaga swasta juga memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Perusahaan memanfaatkan tanggung jawab perusahaan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi namun upaya mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dapat memberikan harapan baru untuk menciptakan wilayah yang lebih aman dan cukup tangguh dalam menghadapi bencana

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zainal Arifin. (2019). Merekonstruksi Peran Agama Dalam Proses Mitigasi Bencana. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.580>
- BNPB. (2021). Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Riau 2022 - 2026. *Kedeputian Bidang Sistem Dan Strategi Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana*, 173.
- Building Urban Resilience. (2013). In *Building Urban Resilience*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8865-5>
- Pasaribu, L. P., Apsari, N. C., & Sulastri, S. (2023). Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan

- Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 140. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.47909>
- Rahman, A., Ardhiyansah, N. F., Pasaribu, H. A., & Saputra, M. R. (2022). Model Mitigasi Bencana Desa Wisata Aik Berik Kecamatan Batukeliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 180–197.
- Ramadani, E. M. (2015). Koordinasi oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 22(3), 383–406.
- S, M. J., & Kartikasari, L. (n.d.). *Perekayasaan Akuntansi Manajemen*. 1–30.
- Sulaiman, N., She, T. W., & Fernando, T. (2019). Community resilience frameworks for building disaster resilient community in Malaysia. *Planning Malaysia*, 17(1), 94–103. <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v17.i9.589>
- Tamitiadini, D., Asmara Dewi, W. W., & Adila, I. (2019). INOVASI MODEL MITIGASI BENCANA NON STRUKTURAL BERBASIS KOMUNIKASI, INFORMASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA (Innovation of Non Structural Disaster Mitigation Model based on Communication, Information, Coordination and Cooperation). *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 41–52. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v13i1.5216>
- Tanzil. (2024). PENGUATAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MENURUNKAN RESIKO BENCANA. *Neo Societal*, 9(1), 4–6.
- Tanzil, Jamaluddin Hos, & Muhammad Arsyad. (2019). Modal Sosial dan Mitigasi Bencana pada Masyarakat di Pulau Makasar Kota Baubau. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.638>
- Tanzil, T. (2019). Peranan Jaringan Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan Nelayan Di Baubau. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 61–71. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1485>
- Tanzil, T. (2023). *Adaptation Strategy of Ambonese Refugee Community on Buton Island in Meeting Household Needs*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2023.2341000>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2019). Disaster Risk Reduction in the Philippines: Status Report. *UNDRR Report*, 1–32. https://www.unisdr.org/files/68265_682308philippinesdrmstatusreport.pdf
- Warsono, H., & Buchari, A. (2019). Kolaborasi Penanganan Bencana. In *Trim Komunikata* (Issue 248).